Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology
Homepage: https://journal.ilmudata.co.id/index.php/ijmst
Vol. 4 No. 3 (2026) pp: 7343-7354
P-ISSN: 2986-6790, e-ISSN: 2986-6782

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Modal, dan Tingkat Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali

Suci Ramadanti, Eka Rima Prasetya
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang
suciraa9@gmail.com, ekarima@unpam.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji secara empiris pengaruh pertumbuhan ekonomi, belanja modal, dan tingkat inflasi terhadap penerimaan pajak daerah di Wilayah Sarbagita (Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tabanan) Provinsi Bali. Pendekatan kuantitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini dengan memanfaatkan data sekunder kurun waktu 10 tahun pengamatan (2016–2025) yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Teknik pengambilan sampel yang diterapkan adalah sampel jenuh (exhaustive sampling), yang menghasilkan 40 data observasi panel dari 4 kabupaten/kota selama 10 periode pengamatan. Analisis regresi data panel dilakukan menggunakan bantuan perangkat lunak EViews 14. Berdasarkan serangkaian uji pemilihan model (Uji Chow dan Uji Hausman), Fixed Effect Model (FEM) ditetapkan sebagai model estimasi terbaik dalam penelitian ini. Hasil pengujian hipotesis secara simultan menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, belanja modal, dan tingkat inflasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Secara parsial, pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah, belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah (menjadi variabel dominan), sedangkan tingkat inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Nilai koefisien determinasi penyesuaian (Adjusted R-squared) sebesar 0,931312 mengindikasikan bahwa 93,13% variasi penerimaan pajak daerah di Wilayah Sarbagita dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen dalam model, sementara sisanya sebesar 6,87% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian.

Kata kunci: Belanja Modal, Penerimaan Pajak Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Inflasi.

Abstract

This study aims to analyze and empirically examine the effects of economic growth, capital expenditure, and inflation on local tax revenue in the Sarbagita Region, consisting of Denpasar City, Badung Regency, Gianyar Regency, and Tabanan Regency, Bali Province. A descriptive quantitative approach was employed using secondary data covering a ten-year observation period from 2016 to 2025, obtained from Statistics Indonesia (BPS) and the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. The sampling technique used was saturated sampling (exhaustive sampling), resulting in 40 panel data observations from four regencies/cities over ten observation periods. Panel data regression analysis was conducted using EViews 14 software. Based on a series of model selection tests, namely the Chow Test and Hausman Test, the Fixed Effect Model (FEM) was determined to be the most appropriate estimation model for this study. The simultaneous hypothesis testing results indicate that economic growth, capital expenditure, and inflation collectively have a significant effect on local tax revenue. Partially, economic growth has a positive and significant effect on local tax revenue, while capital expenditure also has a positive and significant effect and represents the dominant variable. In contrast, inflation has a negative and significant effect on local tax revenue. The adjusted coefficient of determination (Adjusted R-squared) of 0.931312 indicates that 93.13% of the variation in local tax revenue in the Sarbagita Region can be explained by the three independent variables included in the model, while the remaining 6.87% is explained by other factors outside the scope of this study.

Keywords: Capital Expenditure, Local Tax Revenue, Economic Growth, Inflation

1. Pendahuluan

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan dan keuangan daerah memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur, mengurus, serta mengelola sumber daya keuangan daerah secara mandiri. Langkah strategis ini diambil dengan tujuan utama meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, mempercepat

pembangunan infrastruktur di daerah, serta mengurangi tingkat ketergantungan fiskal terhadap alokasi transfer dana dari pemerintah pusat (Sari & Ilyas, 2019). Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pendapatan Asli Daerah (PAD) memegang peranan penting sebagai indikator utama kemandirian fiskal daerah (Mardiasmo, 2018). Komponen terbesar pendukung PAD adalah penerimaan pajak daerah, yang difungsikan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, penyediaan fasilitas umum, serta pelaksanaan pembangunan daerah secara berkesinambungan (Pohan, 2021; Saga et al., 2025). Kondisi ini sangat relevan bagi Provinsi Bali karena struktur ekonominya bertumpu pada pariwisata, perdagangan, akomodasi, makanan dan minuman, serta jasa. Ketergantungan tersebut menyebabkan penerimaan pajak daerah sensitif terhadap perubahan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.

Provinsi Bali merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki karakteristik struktur perekonomian yang sangat khas. Perekonomian Bali bertumpu secara dominan pada sektor pariwisata, perdagangan, serta penyediaan akomodasi dan makan-minum (Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2025). Secara administratif, Provinsi Bali terdiri atas 8 kabupaten dan 1 kota. Di antara wilayah-wilayah tersebut, kawasan perkotaan yang dikenal dengan akronim Sarbagita—meliputi Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tabanan—merupakan aglomerasi ekonomi terpenting dan pusat pertumbuhan utama di Bali (Wulandari & Budhi, 2019). Kawasan perkotaan Sarbagita diperkuat oleh Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014. Wilayah Sarbagita tidak hanya berperan sebagai pusat pemerintahan dan pariwisata budaya, melainkan juga menampung mobilitas kegiatan ekonomi, perdagangan, dan bisnis modal terbesar di Bali. Denpasar berfungsi sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan jasa; Badung merupakan pusat utama industri pariwisata; Gianyar memiliki konsentrasi pariwisata budaya dan ekonomi kreatif; sedangkan Tabanan memiliki fungsi penyangga melalui pertanian, perdagangan, dan pariwisata. Keempat wilayah itu secara geografis dan ekonomi saling terhubung, sehingga perubahan aktivitas ekonomi di satu wilayah dapat berkaitan dengan perkembangan transaksi, konsumsi, investasi, dan penerimaan daerah di wilayah lainnya.

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Bali Tahun 2018-2022

Tahun	Anggaran/Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
2018	3.098.174.893.828	3.230.732.169.802	100,96%
2019	3.235.176.956.048	3.463.996.393.584	107,07%
2020	2.989.347.879.808	2.607.990.396.693	87,24%
2021	2.640.212.076.975	2.458.530.858.700	93,11%
2022	2.879.557.806.488	3.230.839.407.191	112,20%

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2026

Meskipun memiliki potensi fiskal yang besar, realisasi penerimaan pajak daerah di Provinsi Bali menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan selama satu dekade terakhir. Berdasarkan tabel 1 realisasi penerimaan pajak daerah Provinsi Bali pada tahun 2018 mampu melampaui target yaitu sebesar 100,96%, dan meningkat menjadi 107,07% pada tahun 2019. Namun, ketika pandemi COVID-19 merebak pada tahun 2020, perekonomian Bali mengalami pembatasan aktivitas fisik secara masif dan penurunan jumlah wisatawan domestik maupun mancanegara secara drastis (BPS, 2021). Kondisi tersebut berdampak langsung pada penurunan realisasi penerimaan pajak daerah yang hanya mencapai 87,24% pada tahun 2020 dan 93,11% pada tahun 2021 dari target yang ditetapkan. Seiring dengan pembukaan kembali sektor pariwisata dan pemulihan ekonomi pada periode 2022 hingga 2025, pencapaian realisasi pajak daerah kembali bangkit mencapai 112,20% pada tahun 2022 dan terus menunjukkan tren penguatan hingga tahun 2025 (Bapenda Provinsi Bali, 2026). Fluktuasi tersebut mengindikasikan bahwasanya penerimaan pajak daerah sangat rentan terhadap perubahan kondisi makroekonomi dan stabilitas perekonomian daerah. Pola tersebut juga menegaskan adanya perubahan yang kuat antara periode sebelum pandemi, masa pandemi Covid-19, dan fase pemulihan.

Penerimaan pajak daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal, di antaranya pertumbuhan ekonomi, pengeluaran belanja modal pemerintah, dan stabilitas tingkat inflasi. Secara teoritis, pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui laju perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan mengindikasikan kenaikan kapasitas produksi barang dan jasa dalam suatu daerah pada periode tertentu (Sukirno, 2015; Murni, 2016). Menurut Teori Keuangan Publik (*Public Finance Theory*) yang dikembangkan oleh Musgrave dan Musgrave (1989) serta Rosen dan Gayer (2014), pertumbuhan ekonomi yang positif akan meningkatkan taraf pendapatan masyarakat, volume konsumsi, serta ekspansi dunia usaha. Peningkatan aktivitas bisnis dan konsumsi masyarakat ini secara otomatis akan memperluas basis pemajakan (*tax base*) serta meningkatkan kemampuan

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.13958
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

masyarakat dalam membayar pajak (*ability to pay*), sehingga memicu peningkatkan penerimaan pajak daerah (Hanif, 2005; Amaludin & Romadhina, 2023).

Faktor selanjutnya yang diduga memengaruhi penerimaan pajak daerah adalah belanja modal (*capital expenditure*). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran pemerintah daerah yang dialokasikan untuk pengadaan aset tetap dan fasilitas infrastruktur publik yang memiliki masa manfaat ekonomis lebih dari satu tahun anggaran (Republik Indonesia, 2005). Dalam perspektif *Stewardship Theory* yang dikemukakan oleh Donaldson dan Davis (1991), pemerintah daerah bertindak sebagai *steward* yang diberi amanah oleh masyarakat (*principal*) untuk mengelola sumber daya fiskal secara transparan dan berdaya guna. Alokasi belanja modal yang tepat sasaran untuk pembangunan sarana transportasi, pasar, terminal, jalan raya, jaringan irigasi, dan fasilitas pariwisata akan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan produktivitas perekonomian daerah (Sukirno, 2016). Peningkatan sarana publik tersebut akan menurunkan biaya transaksi logistik, memikat arus investasi, dan merangsang pembentukan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang pada gilirannya bermuara pada peningkatan basis pajak daerah (Nicola & Saleh, 2023).

Selain pertumbuhan ekonomi dan belanja modal, variabel tingkat inflasi juga memainkan peranan penting dalam menentukan stabilitas penerimaan pajak daerah. Inflasi merupakan kondisi yang mencerminkan kenaikan tingkat harga-harga barang dan jasa secara umum dan berlangsung secara terus-menerus (Boediono, 2014; Latif et al., 2023). Pengaruh inflasi terhadap penerimaan pajak daerah dapat bekerja melalui dua mekanisme yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, kenaikan harga dapat meningkatkan nilai nominal transaksi penjualan barang dan jasa, sehingga secara teoritis berpotensi menaikkan nilai pajak nominal yang dipungut dari sektor konsumsi seperti pajak restoran dan hotel (Aji & SBM, 2021). Namun di sisi lain, inflasi yang tidak terkendali atau terlalu tinggi akan menggerus daya beli riil masyarakat, menurunkan tingkat tabungan, serta membebani operasional dunia usaha (Putri & Prasetya, 2022). Melemahnya daya beli konsumen pada akhirnya akan menurunkan volume konsumsi publik terhadap barang/jasa non-primer, sehingga berpotensi menekan potensi penerimaan pajak daerah secara riil (Purwanto & Rohman, 2018).

Meskipun landasan konseptual mengenai pengaruh ketiga variabel tersebut telah dipaparkan secara luas, penelitian terdahulu masih menunjukkan inkonsistensi atau perbedaan hasil penelitian (*research gap*). Penelitian yang dilakukan oleh Sarjono et al. (2018), Amaludin dan Romadhina (2023), Sania et al. (2018), serta Rosyadi (2024) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Namun demikian, penelitian Triastuti dan Pratomo (2016) di Kota Bandung menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Mengenai variabel belanja modal, penelitian Nicola dan Saleh (2023), Prasetyo dan Bawono (2022), serta Nabila et al. (2025) membuktikan bahwa belanja modal memberikan kontribusi positif signifikan terhadap realisasi penerimaan pajak daerah. Sebaliknya, riset Hasibuan (2019) menyimpulkan bahwa belanja modal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Untuk variabel inflasi, Purwanto dan Rohman (2018) serta Betari (2018) menemukan pengaruh negatif signifikan inflasi terhadap pajak daerah, sedangkan Hidayat (2021) dan Rosyadi (2024) mengindikasikan bahwa inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

Adanya inkonsistensi penelitiam terdahulu serta fluktuasi penerimaan pajak daerah pascapandemi COVID-19 melandasi kebaruan (*novelty*) dan urgensi dari penelitian ini. Kebaruan penelitian ini terletak pada pemilihan objek studi kawasan aglomerasi ekonomi perkotaan Wilayah Sarbagita Provinsi Bali dengan durasi waktu pengamatan selama 10 tahun (2016–2025). Periode ini sangat krusial karena mencakup episode pra-pandemi (2016–2019), guncangan hebat pandemi COVID-19 (2020–2021), serta fase pemulihan dan penguatan fiskal daerah (2022–2025). Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul "**Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Modal, Dan Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali**".

2. Metode Penelitian

2.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengujian hipotesis dan pengukuran hubungan kausal antarvariabel numerik yang bersumber dari laporan keuangan resmi (Sugiyono, 2019). Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.13958
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

berbentuk data panel, yang mengombinasikan data deret waktu (*time-series*) kurun waktu 10 tahun dari tahun 2016 hingga 2025, dan data lintas individu (*cross-section*) berupa 4 kabupaten/kota yang tergolong dalam kawasan aglomerasi Wilayah Sarbagita Provinsi Bali (Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tabanan). Sumber data sekunder diperoleh melalui situs resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) daerah setempat. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan mengaplikasikan analisis regresi data panel menggunakan bantuan program EViews 14.

2.2. Operasional Variabel

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator kenaikan output perekonomian riil daerah dari tahun ke tahun yang diukur dari persentase laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 (Murni, 2016). Dihitung dengan menggunakan rumus, sebagai berikut :

$$LPE = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \; x\; 100\%$$

(Sukirno, 2006)

Belanja Modal

Belanja modal merupakan total realisasi pengeluaran kas pemerintah kabupaten/kota di Wilayah Sarbagita yang dialokasikan untuk perolehan aset tetap, pembangunan infrastruktur, jaringan irigasi, jalan, gedung, serta sarana umum yang memiliki masa manfaat ekonomis lebih dari 12 bulan (Permendagri No. 13 Tahun 2006). Data disajikan dalam satuan Miliar Rupiah.

Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi merupakan persentase perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari tahun ke tahun yang menggambarkan fluktuasi harga barang dan jasa (Sukirno, 2015). Mengingat Kota Denpasar bertindak sebagai titik acuan (*proxy*) utama pergerakan inflasi daerah kawasan Sarbagita yang dipublikasikan secara konsisten oleh BPS, data inflasi IHK Kota Denpasar digunakan untuk mewakili kondisi harga kawasan. Dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$Tingkat\ Inflasi = \frac{IHK_t - IHK_{t-1}}{IHK_{t-1}} \; x\; 100\%$$

(www.bps.go.id)

Penerimaan Pajak Daerah

Penerimaan pajak daerah merupakan total realisasi pendapatan kas daerah yang bersumber dari pemungutan pajak daerah kabupaten/kota di Wilayah Sarbagita (seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, PBB-P2, BPHTB, dan jenis pajak daerah lainnya) berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 (Mardiasmo, 2019).

2.3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh data realisasi laporan keuangan APBD dan indikator makroekonomi pada 4 kabupaten/kota di Wilayah Sarbagita selama rentang tahun pengamatan 2016–2025. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah metode sampel jenuh (*exhaustive sampling* atau sensus), di mana seluruh anggota populasi dijadikan sampel penelitian (Sugiyono, 2011). Pemilihan sampel jenuh didasarkan pada pertimbangan bahwa jumlah populasi daerah di Wilayah Sarbagita relatif homogen dan terbatas (N = 4). Dengan demikian, ukuran sampel keseluruhan dalam penelitian ini adalah 4 unit *cross-section* dikalikan 10 periode *time-series*, sehingga diperoleh total 40 unit data observasi (n = 40).

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.13958
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Statistik Deskriptif

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	Y	X1	X2	X3
Mean	1,438.6370	0.034585	488.8968	-0.003536
Median	695.2950	0.056005	310.4350	0.029470
Maximum	7,202.5100	0.112950	2,082.8300	0.050870
Minimum	97.0700	-0.165530	95.1300	-0.217510
Std. Dev.	1,807.5620	0.056332	445.8012	0.078672
Skewness	1.852706	-1.880903	2.054698	-2.054006
Kurtosis	5.637578	6.151633	6.905078	5.858028
Jarque-Bera	34.4782	40.1400	53.5613	41.7402
Probability	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
Sum	57,545.4600	1.383400	19,555.8700	-0.141420
Sum Sq.	2.10E+08	0.171603	17311612	0.241882
Sum Sq. Dev.	1.27E+08	0.123758	7,750,811	0.241382
Observations	40	40	40	40

Sumber: Output Eviews 14 (data diolah Peneliti, 2026)

Berdasarkan data pada Tabel 2, penerimaan pajak daerah (Y) mencatatkan rata-rata (mean) sebesar Rp1.438,637 Miliar dengan standar deviasi sebesar Rp1.807,562 Miliar. Tingginya angka deviasi standar melebihi rata-rata mengindikasikan adanya ketimpangan atau variasi besaran realisasi penerimaan pajak daerah yang lumayan tajam antarwilayah di kawasan Sarbagita. Nilai penerimaan pajak daerah paling maksimum tercatat sebesar Rp7.202,510 Miliar yang berhasil dibukukan oleh Kabupaten Badung pada tahun 2025. Sebaliknya, realisasi terkecil (minimum) terjadi di Kabupaten Tabanan pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp97,070 Miliar, yang mana periode tersebut bertepatan dengan kontraksi hebat sektor pariwisata Bali akibat diterapkannya kebijakan pembatasan mobilitas sosial masa pandemi COVID-19.

Pertumbuhan ekonomi (X1), diperoleh nilai rata-rata sebesar 0,034585 (3,46 persen) dengan deviasi standar 0,056332. Angka rata-rata bernilai positif menunjukkan bahwasanya secara keseluruhan perekonomian Wilayah Sarbagita tetap mengalami pertumbuhan positif selama rentang tahun 2016–2025. Nilai maksimum pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 0,112950 (11,30 persen) di Kabupaten Badung pada tahun 2023, yang mencerminkan fase akselerasi pemulihan pariwisata pascapandemi. Adapun titik pertumbuhan paling terendah (minimum) tercatat sebesar -0,165530 (-16,55 persen) yang dialami Kabupaten Badung pada tahun 2020 akibat merosotnya angka kunjungan wisatawan nasional dan asing.

Sementara itu, belanja modal (X2) mencatatkan rata-rata realisasi pengeluaran sebesar Rp488,8968 Miliar dengan tingkat deviasi standar Rp445,8012 Miliar. Nilai tertinggi belanja modal dicapai oleh Kabupaten Badung pada tahun 2025 yakni sebesar Rp2.082,830 Miliar seiring dengan besarnya porsi pendapatan daerah yang dialokasikan kembali untuk pembangunan fasilitas sarana publik. Sedangkan realisasi belanja modal paling terendah tercatat pada Kota Denpasar tahun 2020 yaitu sebesar Rp95,130 Miliar akibat adanya efisiensi dan rasionalisasi anggaran APBD untuk penanganan krisis kesehatan.

Terakhir, tingkat inflasi (X3) memiliki rata-rata sebesar -0,003536 (-0,35 persen) dengan standar deviasi sebesar 0,078672. Nilai inflasi tertinggi berada pada level 0,050870 (5,09 persen) yang terjadi pada Kabupaten Badung tahun 2022 akibat penyesuaian harga BBM nasional, sementara inflasi terendah tercatat pada angka -0,217510 (-21,75 persen) pada tahun 2020 sebagai dampak deflasi hebat akibat penurunan permintaan barang dan jasa publik secara drastis.

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.13958
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

3.2. Pemilihan Model Regresi Data Panel

Uji Chow (*Chow Test*)

Tabel 3. Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests Equation: MODEL_FEM Test cross-section fixed effects			
Effects Test	**Statistic**	**d.f.**	**Prob.**
Cross-section F	19.051332	(3,33)	0.0000
Cross-section Chi-square	40.200469	3	0.0000

Sumber: data diolah Peneliti, 2026.

Berdasarkan tabel 3 hasil uji chow diperoleh nilai probabilitas Cross-section Chi-square sebesar 0,0000 < 0,05. Maka H0 ditolak dan model yang terpilih adalah Fixed Effect Model (FEM).

Uji Hausman (*Hausman Test*)

Tabel 4. Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: MODEL_REM Test cross-section random effects			
Test Summary	**Chi-Sq. Statistic**	**Chi-Sq. d.f.**	**Prob.**
Cross-section random	57.153997	3	0.0000

Sumber: data diolah Peneliti, 2026.

Berdasarkan tabel 4 hasil uji hausman, diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,0000 < 0,05. Maka H0 ditolak dan model yang dipilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM). Hasil Uji Chow dan Uji Hausman sama-sama menunjukkan FEM sebagai model terbaik, maka model yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed Effect Model* (FEM) sehingga untuk model estimasi selanjutnya yaitu uji *Lagrange Multiplier* (LM) tidak perlu dilakukan.

3.3. Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

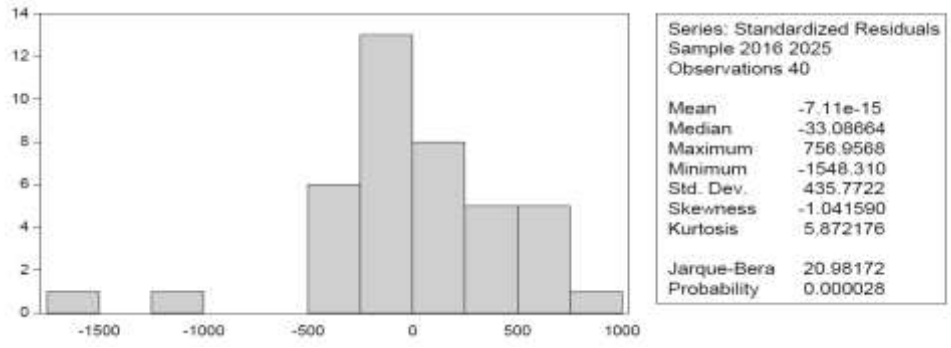

Gambar 1. Uji Normalitas
Sumber: Output Eviews 14 (data diolah Penulis, 2026)

Hasil uji normalitas menunjukkan nilai probabilitas *Jarque-Bera* sebesar 0,000028 < 0,05, sehingga residual tidak berdistribusi normal. Namun demikian, karena jumlah sampel dalam penelitian ini lebih dari 30 (n = 40), maka berdasarkan *Central Limit Theorem*, distribusi data dapat diasumsikan mendekati normal. Sehingga model regresi tetap dapat digunakan untuk pengujian hipotesis (Gujarati dan Porter, 2009).

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.13958
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Uji Multikolinearitas

Tabel 5. Uji Muktikolinearitas

Variance Inflation Factors
Date: 04/19/26 Time: 20:39
Sample: 1 40
Included observations: 40

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	37816.4000	2.691464	NA
X1	13,351,863	4.076779	2.940114
X2	0.084960	2.616973	1.171680
X3	6,331,111	2.724808	2.719173

Sumber: data diolah Peneliti, 2026

Berdasarkan tabel 5 hasil uji multikolinearitas, diperoleh nilai Centered VIF untuk variabel Pertumbuhan Ekonomi (X1) sebesar 2,940114, Belanja Modal (X2) sebesar 1,171680, dan Tingkat Inflasi (X3) sebesar 2,719173. Oleh karena seluruh nilai Centered VIF variabel independen berada jauh di bawah nilai ambang 10,0 (VIF kurang dari 10), disimpulkan model regresi terbebas dari masalah multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser
Null hypothesis: Homoskedasticity

Test	Statistic	Prob. Specification	Prob.
F-statistic	1.079775	Prob. F(3,36)	0.3699
Obs*R-squared	3.302121	Prob. Chi-Square(3)	0.3473
Scaled explained SS	3.403906	Prob. Chi-Square(3)	0.3334

Sumber: data diolah Peneliti, 2026

Berdasarkan tabel 3 hasil uji heteroskedastisitas, pengujian menunjukkan hasil uji Glejser nilai *Prob.Chi-Square(3) (Obs*R-squared)* sebesar 0,3473 > 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Tabel 7. Uji Autokorelasi

R-squared	0.473278	Mean dependent var	4.86E-13
Adjusted R-squared	0.395819	S.D. dependent var	720.269000
S.E. of regression	559.858500	Akaike info criterion	15.630730
Sum squared resid	10657011	Schwarz criterion	15.884060
Log likelihood	-306.614500	Hannan-Quinn criter.	15.722320
F-statistic	6.110040	Durbin-Watson stat	1.825610
Prob(F-statistic)	0.000387		

Sumber: data diolah Peneliti, 2026

Berdasarkan tabel 7 hasil uji autokorelasi, diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 1,825610 dengan ketentuan DU < DW < 4-DU, yaitu 1,6589 < 1,825610 < 2,3411, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi dalam model penelitian.

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.13958
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

3.4. Analisis Regresi Data Panel

Tabel 8. Hasil Analisis Regresi Data Panel

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 04/19/26 Time: 20:09
Sample: 2016 2025
Periods included: 10
Cross-sections included: 4
Total panel (balanced) observations: 40

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	60.00852	141.5613	0.423905	0.6744
X1	8372.160	2461.164	3.401707	0.0018
X2	2.199381	0.276241	7.961807	0.0000
X3	-3905.074	1636.931	-2.385607	0.0229

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.941879	Mean dependent var	1,438.637
Adjusted R-squared	0.931312	S.D. dependent var	1,807.562
S.E. of regression	473.7343	Akaike info criterion	15.31680
Sum squared resid	7,405,997	Schwarz criterion	15.61235
Log likelihood	-299.3360	Hannan-Quinn criter.	15.42366
F-statistic	89.13028	Durbin-Watson stat	0.833785
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: data diolah Peneliti, 2026

Dari hasil uji tersebut diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$\mathbf{Y = 60.0089 + 8372.160X1 + 2.199381X2 - 3905.074X3}$$

Interpretasi persamaan tersebut adalah:

1. Konstanta sebesar 60,0089 menunjukkan bahwa apabila seluruh variabel independen bernilai konstan, maka besarnya penerimaan pajak daerah di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali adalah sebesar 60,0089.
2. Koefisien regresi variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 8372,160 dan bernilai positif menunjukkan bahwa kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 1% akan meningkatkan penerimaan pajak daerah sebesar 8372,160 dengan asumsi variabel independen lainnya konstan.
3. Koefisien regresi belanja modal sebesar 2,199381 menunjukkan bahwa kenaikan belanja modal sebesar 1 satuan akan meningkatkan penerimaan pajak daerah sebesar 2,199381 dengan asumsi variabel independen lainnya konstan.
4. Koefisien regresi tingkat inflasi sebesar -3905,074 menunjukkan bahwa kenaikan inflasi sebesar 1% akan menurunkan penerimaan pajak daerah sebesar 3905,074 satuan dengan asumsi variabel independen lainnya konstan.

3.5. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

R-squared	0.941879	Mean dependent var	1,438.637
Adjusted R-squared	**0.931312**	S.D. dependent var	1,807.562
S.E. of regression	473.7343	Akaike info criterion	15.31680
Sum squared resid	7,405,997	Schwarz criterion	15.61235
Log likelihood	-299.3360	Hannan-Quinn criter.	15.42366
F-statistic	89.13028	Durbin-Watson stat	0.833785
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: data diolah Peneliti, 2026

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.13958
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Berdsarkan tabel 9, Nilai *Adjusted R-Squared* sebesar 0,931312. Hal ini berarti sebesar 93,13% variasi penerimaan pajak daerah dapat dijelaskan oleh variabel pertumbuhan ekonomi, belanja modal, dan tingkat inflasi, sedangkan sisanya sebesar 6,87% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian.

3.6. Pengujian Hipotesis

Pengujian Hipotesis Simultan (Uji F)

Tabel 10. Hasil Uji Simultan

R-squared	0.941879	Mean dependent var	1,438.637
Adjusted R-squared	0.931312	S.D. dependent var	1,807.562
S.E. of regression	473.7343	Akaike info criterion	15.31680
Sum squared resid	7,405,997	Schwarz criterion	15.61235
Log likelihood	-299.3360	Hannan-Quinn criter.	15.42366
F-statistic	**89.13028**	Durbin-Watson stat	0.833785
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: data diolah Peneliti, 2026

Berdasarkan tabel 10, diperoleh nilai F hitung (*F-statistic*) sebesar 89,13028. Untuk menentukan nilai F tabel, digunakan derajat kebebasan yaitu df1 (k − 1) = jumlah variabel independen = 3, df2 (n − k) = 40 − 4 = 36. Dengan tingkat signifikansi α = 5% (0,05), maka diperoleh nilai F tabel sebesar 2,87.

Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai F hitung > F tabel (89,13028 > 2,87) dan nilai probabilitas sebesar 0,000000 < 0,05, sehingga H0 ditolak dan H4 diterima. Artinya, variabel pertumbuhan ekonomi (X1), belanja modal (X2), dan tingkat inflasi (X3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah (Y).

Dengan demikian, seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen dapat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi faktor ekonomi makro dan kebijakan fiskal daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Pengujian Hipotesis Parsial (Uji T)

Tabel 10. Hasil Uji Parsial

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 04/19/26 Time: 20:09
Sample: 2016 2025
Periods included: 10
Cross-sections included: 4
Total panel (balanced) observations: 40

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	60.00852	141.5613	0.423905	0.6744
X1	8372.160	2461.164	3.401707	0.0018
X2	2.199381	0.276241	7.961807	0.0000
X3	-3905.074	1636.931	-2.385607	0.0229

Sumber: data diolah Peneliti, 2026

Berdasarkan tabel 10 hasil uji t di atas, diperoleh nilai t tabel dengan rumus, df = n − k = 40 − 4 = 36 dengan tingkat signifikansi α = 5% (0,05), sehingga diperoleh nilai t tabel sebesar 2,02809. Maka, hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pertumbuhan Ekonomi

Hasil uji t menghasilkan nilai t hitung sebesar 3,4017, sedangkan t tabel sebesar 2,02809 karena t hitung > t tabel (3,4017 > 2,02809) dan nilai probabilitas sebesar 0,0018 < 0,05. Dengan demikian, H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Penerimaan Pajak

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.13958
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Daerah di Wilayah Sarbagita. Besaran kontribusi pengaruh parsial pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak daerah adalah sebesar 24,32 persen.

b. Belanja Modal

Hasil uji t menghasilkan nilai t hitung sebesar 7,9618, sedangkan t tabel sebesar 2,02809 karena t hitung > t tabel (7,9618 > 2,02809) dan nilai probabilitas sebesar 0,0000 < 0,05. Maka H0 ditolak dan H2 diterima. Artinya, Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Wilayah Sarbagita. Besaran kontribusi pengaruh parsial variabel belanja modal tercatat sangat dominan yaitu mencapai 63,78 persen.

c. Tingkat Inflasi (X3)

Hasil uji t menghasilkan nilai t hitung sebesar -2,3856, sedangkan t tabel sebesar 2,02809 karena t hitung > t tabel (2,3856 > 2,02809) dan nilai probabilitas sebesar 0,0229 < 0,05. Maka H0 ditolak dan H3 diterima. Artinya, Tingkat Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan secara parsial terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Wilayah Sarbagita. Besaran kontribusi pengaruh parsial inflasi adalah sebesar 13,65 persen dengan arah pengaruh negatif.

3.7. Pembahasan

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Berdasarkan hasil penelitian membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah (Y) di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. Hasil penelitian ini mengonfirmasi teori Keuangan Publik (*Public Finance Theory*) yang dikemukakan oleh Musgrave dan Musgrave (1989), yang menyatakan bahwa pertumbuhan perekonomian suatu daerah berdampak pada perluasan kapasitas fiskal pemerintah (Rosen & Gayer, 2014). Pertumbuhan ekonomi kawasan Sarbagita yang didorong oleh sektor pariwisata, akomodasi perhotelan, katering, serta usaha mikro dan kecil meningkatkan keseluruhan penerimaan riil masyarakat dan keuntungan dunia usaha. Seiring meningkatnya pendapatan regional (PDRB), daya bayar masyarakat (*ability to pay*) untuk membayar kewajiban perpajakan ikut mengalami kenaikan. Pada daerah Sarbagita (khususnya Kabupaten Badung dan Kota Denpasar), perluasan ekonomi memicu intensitas transaksi bisnis yang secara langsung meningkatkan jumlah pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Amaludin dan Romadhina (2023), Andiya (2019), Sarjono et al. (2018), serta Sania et al. (2018), yang menjelaskan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah. Hasil ini sekaligus mematahkan argumen Triastuti dan Pratomo (2016) yang sempat menemukan ketidak-signifikanan pengaruh pertumbuhan ekonomi di daerah lain.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Berdasarkan hasil uji parsial, belanja modal (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah (Y) di Wilayah Sarbagita, serta menjadi variabel determinan yang memberikan porsi pengaruh paling dominan (63,78 persen). Hasil penelitian ini menguatkan relevansi *Stewardship Theory* yang dirumuskan oleh Donaldson dan Davis (1991). Pemerintah daerah di Wilayah Sarbagita yang bertindak sebagai *steward* telah berhasil mengalokasikan anggaran belanja modal publik untuk pengadaan aset-aset produktif seperti perluasan jaringan jalan, pembangunan sarana utilitas kota, fasilitas aksesibilitas objek pariwisata, serta penguatan infrastruktur digital. Penyediaan infrastruktur publik yang berkualitas menurunkan biaya operasi logistik (*cost of doing business*), meningkatkan efisiensi mobilitas barang dan jasa, serta menciptakan iklim investasi daerah yang kondusif. Dampaknya, muncul investasi bisnis baru di sektor riil yang otomatis membuka lapangan kerja baru dan memperluas objek serta subjek pajak daerah baru. Belanja modal menciptakan *multiplier effect*, ini terbukti ampuh mendorong penerimaan kas daerah dari sektor perpajakan. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Nicola dan Saleh (2023), Prasetyo dan Bawono (2022), serta Nabila et al. (2025) yang menyatakan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.13958
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Pengaruh Tingkat Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Berdasarkan hasil penelitian tingkat inflasi (X3) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah (Y) di Wilayah Sarbagita. Kenaikan inflasi yang ditandai oleh lonjakan harga komoditas publik menurunkan nilai riil uang dan menggerus daya beli masyarakat (Purwanto & Rohman, 2018; Latif et al., 2023). Ketika tingkat inflasi naik, konsumen cenderung mengalokasikan pendapatan harian mereka hanya untuk pemenuhan kebutuhan dasar primer dan menekan pengeluaran konsumsi sekunder maupun tersier (seperti rekreasi, wisata, makan di restoran, dan hiburan). Menurunnya tingkat konsumsi publik pada sektor hiburan dan pariwisata akibat inflasi secara langsung berdampak pada merosotnya omset usaha penyedia jasa hiburan dan hotel, yang pada akhirnya menekan volume penerimaan Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Hiburan yang dikumpulkan pemerintah kabupaten/kota di Sarbagita. Selain itu, inflasi meningkatkan beban operasional dunia usaha, yang dapat menurunkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dijalankan oleh Betari (2018) serta Purwanto dan Rohman (2018) menunjukkan bahwa Inflasi berpengaruh secara negatif terhadap penerimaan pajak daerah. Hasil penelitian ini juga berbeda dengan Amaludin dan Romadhina (2023) yang menemukan bahwa inflasi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah secara umum. Perbedaan hasil tersebut dapat disebabkan oleh perbedaan wilayah penelitian, periode penelitian, struktur ekonomi daerah, serta tingkat inflasi yang terjadi pada masing-masing daerah.

4. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Modal, dan Tingkat Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan, yaitu: 1). Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap penerimaan pajak daerah di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali periode 2016–2025. 2). Belanja modal berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap penerimaan pajak daerah di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali periode 2016–2025. 3). Tingkat inflasi berpengaruh negatif dan signifikan secara parsial terhadap penerimaan pajak daerah di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali periode 2016–2025. 4). Secara simultan, pertumbuhan ekonomi, belanja modal, dan tingkat inflasi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali periode 2016–2025.

Referensi

1. Abdul Halim. (2014). Akuntansi keuangan daerah. Salemba Empat.
2. Aji, F. B., & SBM, N. (2021). Faktor-faktor yang mempengaruhi pajak daerah Kota Semarang. Diponegoro Journal of Economics, 10(1), 1–12. https://doi.org/10.14710/dje.29995
3. Amaliah, E. N., Darnah, D., & Sifriyani, S. (2020). Regresi data panel dengan pendekatan common effect model (CEM), fixed effect model (FEM), dan random effect model (REM). ESTIMASI: Journal of Statistics and Its Application, 1(2), 106–114. https://doi.org/10.20956/ejsa.v1i2.10574
4. Amaludin, A., & Romadhina, A. P. (2023). Pengaruh laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi terhadap penerimaan pajak daerah di provinsi di Indonesia periode 2017-2021. Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Jayakarta, 4(2), 123–137. https://doi.org/10.53825/japjayakarta.v4i2.162
5. Andiya, R. (2019). Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi terhadap penerimaan pajak daerah. Jurnal Ekonomi Daerah, 7(1), 12–25.
6. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali. (2025). Laporan kinerja instansi pemerintah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali tahun 2024. Pemerintah Provinsi Bali.
7. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali. (2026). Laporan realisasi pendapatan asli daerah Provinsi Bali tahun 2025. Bapenda Bali.
8. Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. (2025). Provinsi Bali dalam angka 2025. Badan Pusat Statistik.
9. Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. (2026). Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto dan Inflasi Provinsi Bali 2026. BPS Bali.
10. Betari, D. (2018). Pengaruh inflasi terhadap penerimaan pajak daerah. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 5(2), 88–97.
11. Boediono. (2014). Ekonomi makro. BPFE.
12. Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns. Australian Journal of Management, 16(1), 49–64. https://doi.org/10.1177/031289629101600103
13. Ghozali, I. (2017). Analisis multivariat dan ekonometrika: Teori, konsep dan aplikasi dengan EViews. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
14. Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). Basic econometrics (5th ed.). McGraw-Hill.
15. Hanif, N. (2005). Teori dan analisis kebijakan pajak daerah. Raja Grafindo Persada.
16. Hasibuan, R. (2019). Pengaruh belanja modal dan inflasi terhadap penerimaan pajak daerah. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah, 4(1), 30–42.
17. Hidayat, A. (2021). Analisis determinan penerimaan pajak daerah kabupaten/kota. Jurnal Kebijakan Fiskal, 8(2), 112–125.
18. Latif, A. S., Risma, D. E., Septanta, R., & Arslan, R. (2023). Pengaruh volume perdagangan saham, tingkat inflasi dan tax rate terhadap indeks harga saham gabungan (IHSG). INNOVATIVE: Journal of Social Science Research, 3(5), 5000–5013. https://doi.org/10.31004/innovative.v3i5.5124
19. Machali, I. (2016). Metode penelitian kuantitatif. Program Studi Manajemen Pendidikan Islam UIN Sunan Kalijaga.
20. Mangkoesoebroto, G. (1993). Ekonomi publik (3rd ed.). BPFE Yogyakarta.

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.13958
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

21. Mardiasmo. (2018). Otonomi dan manajemen keuangan daerah. Andi.
22. Mardiasmo. (2019). Perpajakan. Andi.
23. Murni, A. (2016). Ekonomika makro (Edisi Revisi). Refika Aditama.
24. Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). Public finance in theory and practice (5th ed.). McGraw-Hill.
25. Nabila, F., Rizal, M., Andiny, P., Fuad, M., & Safrizal, S. (2025). Dampak belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan subsidi terhadap realisasi penerimaan pajak di Indonesia. Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis, 16(3), 692–706. https://doi.org/10.33059/jseb.v16i3.10214
26. Nicola, N., & Saleh, A. (2023). Pengaruh PDRB, belanja modal, dan jumlah penduduk terhadap penerimaan pajak daerah di Kabupaten Banjar. JIEP (Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan), 6(2), 995–1007. https://doi.org/10.20527/jiep.v6i2.10245
27. Pohan, C. A. (2021). Kebijakan dan administrasi perpajakan daerah di Indonesia. Gramedia Pustaka Utama.
28. Prasetyo, A., & Bawono, A. D. (2022). Pengaruh belanja modal, pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, dan kunjungan wisatawan terhadap penerimaan pajak daerah di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2019. Seminar Nasional LPPM UMMAT, 1, 639–646.
29. Purwanto, E., & Rohman, S. (2018). Pengaruh tingkat inflasi terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Bandung periode 2008 s.d 2017. Prosiding Seminar Nasional Sistem Informasi Manajemen dan Keuangan, 1, 38–46.
30. Putri, W. C., & Prasetya, E. R. (2022). Harga emas dunia memoderasi hubungan nilai kurs rupiah, inflasi, dan suku bunga SBI terhadap indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia tahun 2016–2019. Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, 1(1), 58–69.
31. Republik Indonesia. (2005). Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Lembaran Negara RI.
32. Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara RI.
33. Republik Indonesia. (2011). Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Sekretariat Negara.
34. Republik Indonesia. (2014). Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011. Sekretariat Negara.
35. Rosen, H. S., & Gayer, T. (2014). Public finance (10th ed.). McGraw-Hill.
36. Rosyadi, M. R. (2024). Determinan penerimaan pajak daerah di Indonesia. JURNALKU, 4(2), 55–67. https://doi.org/10.54957/jurnalku.v4i2.648
37. Saga, B., Ekarisma, D., Latif, A. S., & Septanta, R. (2025). Pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak. PRODUKTIF: Jurnal Kepegawaian dan Organisasi, 4(1), 42–51. https://doi.org/10.35850/produktif.v4i1.189
38. Sania, N., Yunita, E., & Muttaqim, A. (2018). Pengaruh jumlah penduduk, produk domestik regional bruto dan inflasi terhadap penerimaan pajak daerah pada kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 9(2), 115–128.
39. Sarjono, H., Anwar, M., & Darmansyah, D. (2018). Analisa pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak daerah dengan tingkat kemiskinan sebagai variabel moderasi. Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi, 6(12), 113–127.
40. Sari, D. P., & Ilyas, F. (2019). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah di Provinsi Bengkulu. Jurnal Akuntansi, 6(1), 75–85. https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.6.1.75-85
41. Sugiyono. (2011). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. Alfabeta.
42. Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
43. Sukirno, S. (2006). Makroekonomi: Teori pengantar (Edisi ke-3). Raja Grafindo Persada.
44. Sukirno, S. (2015). Makroekonomi teori pengantar. Rajawali Pers.
45. Sukirno, S. (2016). Makroekonomi teori pengantar. Rajawali Pers.
46. Triastuti, D., & Pratomo, D. (2016). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, belanja modal, dan inflasi terhadap penerimaan pajak daerah. e-Proceeding of Management, 3(1), 320–330.
47. Walpole, R. E. (2012). Probability and statistics for engineers and scientists (9th ed.). Pearson.
48. Widarjono, A. (2018). Ekonometrika pengantar dan aplikasinya disertai panduan EViews. UPP STIM YKPN.
49. Wulandari, D., & Budhi, M. K. S. (2019). Analisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di kawasan Sarbagita. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, 8(4), 850–879.

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i3.13958
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)